



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 103 /KEP/HK/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 10/KEP/HK/2021 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 10/KEP/HK/2021 telah ditetapkan Program Pembentukan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa masih terdapat usulan rancangan peraturan gubernur dari perangkat daerah yang belum terakomodir dalam Program Pembentukan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 10/KEP/HK/2021 Tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 73 Tahun 2019 tentang Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 74);
5. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 10/KEP/HK/2021 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 10/KEP/HK/2021 Tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 Maret 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 103 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 19 Maret 2021**PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	ASAL PERANGKAT DAERAH
1	2	3
1	Inovasi Daerah	Bappelitbangda
2	Sistem Manajemen Keamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Sentra Informasi Ekonomi Pertanian Terpadu	Dinas Komunikasi dan Informatika
4	Pengelolaan Website Resmi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Dinas Komunikasi dan Informatika
5	Standarisasi Peralatan Jaringan Local Area Network (LAN) Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Dinas Komunikasi dan Informatika
6	Penetapan Arsitektur Jaringan Local Areal Network (LAN) Pada Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Dinas Komunikasi dan Informatika
7	Besaran Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan	Sekretariat DPRD
8	Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Anggota Dewan	Sekretariat DPRD
9	Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan	Sekretariat DPRD
10	Pedoman Penggunaan Nomor Kendaraan Dinas Roda Empat Bagi Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Biro Organisasi
11	Tata Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Biro Organisasi
12	Mekanisme Manajemen Kas berbasis Manual Tahun Anggaran 2021	Badan Keuangan Daerah
13	Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021	Badan Keuangan Daerah
14	Nilai Jual Kendaraan Bermotor Dan Nilai Jual Ubah Bentuk Untuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2021	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

15	Perlindungan Anak Dari Radikalisme Dan Tindak Pidana Terorisme di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16	Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
17	Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Inspektorat Daerah
18	Penetapan Kawasan Tertib Lalu Lintas Di Destinasi Wisata Di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Dinas Perhubungan
19	Pendidikan Berlalu Lintas Sebagai Kurikulum Muatan Lokal Pada Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Luar Biasa Di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Dinas Perhubungan
20	Pelaksanaan Sekolah Menengah Kejuruan Plus 1 Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
21	Pemberian Insentif Dokter Pada RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang	RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang
22	Tata Cara Penghapusan Piutang Pada RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang	RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang
23	Tata Cara Kerja Sama Dengan Pihak Lain Pada RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang	RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang
24	Pedoman Pengelolaan Investasi Pada RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang	RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang
25	Pedoman Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang	RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang
26	Kebijakan Akuntansi BLUD Pada RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang	RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang
27	Pelaksanaan Anggaran BLUD Pada RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang	RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang
28	Pedoman Tata Kelola Pada RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang	RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang


 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

 VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT